

KEBENARAN SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL

WAHYU SATRIA WIBOWO[⊕]

Abstract: What is a truth? For many centuries humans have tried to explore this question. This paper puts forward some thinking about truth, especially social construction as a truth based on the thinking of Karl Marx and Jürgen Habermas. Truth is constructed by social situation. We can analyze social construction as a starting point for the question of truth. At the end, this paper also presents the relation between truth as a social construction and biblical exegesis.

Key words: kebenaran, kontruksi, kontruksi sosial, konteks sosial, konsensus.

PENDAHULUAN

Dalam panggung sejarah manusia masalah kebenaran merupakan masalah yang senantiasa diperdebatkan dengan tidak habis-habisnya. Dari ranah filsafat, mulai dari pemikiran Plato sampai Habermas atau Rorty pada masa kontemporer ini, diwarnai dengan perdebatan mengenai masalah kebenaran. Sementara itu tidak terelakkan lagi debat kebenaran dalam keagamaan. Antar agama seringkali berdebat panas mengenai kebenaran dan tidak jarang menghasilkan pertengkaran. Jangankan antar agama, dalam satu agama saja, permasalahan kebenaran bisa mencuat dan menjadi titik pertikaian. Kitab suci dengan semua latar belakang pengalaman yang dimasukkan ke dalamnya merupakan realitas yang terbuka untuk “dibaca” oleh pembaca saat ini dan sekaligus menjadi realitas yang terbuka untuk ditafsirkan dan dipahami dalam konteks pembaca saat ini. Dengan demikian masalah apakah yang disebut kebenaran menjadi masalah yang akan terus menerus diperdebatkan.

Memang ada berbagai pendapat mengenai kebenaran. Di satu pihak ada yang menilai kebenaran sebagai sesuatu yang mutlak, universal dan ideal; yang tidak akan dapat dicapai oleh manusia. “*God’s-eye view*” menjadi penjamin kebenaran. Sementara itu ada yang melihat kebenaran sebagai sesuatu yang lebih bersifat relatif, tergantung dari bahasa dan situasi sosial yang ada. Realitas social pemberi informasi dalam suatu relasi social bisa jadi berbeda dengan realitas penerima informasi sehingga titik tolak kebenaran keduanya menjadi berbeda pula. Hal itu tercermin dari realitas

[⊕] Wahyu Satria Wibowo, M.Hum., dosen biasa pada Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana.

berbahasa. Bahasa merupakan pengungkap realita. Untuk itu setiap bahasa mempunyai "realitas kebenaran" sendiri. Tidak ada kebenaran yang mutlak dan universal. Namun banyak juga yang mengambil posisi di tengah-tengah, di antara kedua pemahaman tersebut, dengan berbagai variasi pendapatnya. Kebenaran nampaknya menjadi salah satu "barang" yang keniscayaannya untuk dicapai manusia sangat dirindukan.

Namun titik tolak apa yang dapat diambil untuk menilai sebuah kebenaran? Secara epistemologis ada berbagai teori. Ada teori mengenai kebenaran korespondensi, yaitu sebuah pernyataan benar ketika mempunyai kesesuaian dengan realita. Ada juga yang disebut sebagai kebenaran koherensi, yaitu jika sebuah pernyataan benar jika pernyataan itu koheren dengan realita. Di samping kedua hal di atas, ada yang disebut sebagai teori konstruksi social. Kebenaran dinilai kebenarannya sebagai bagian dari konstruksi social masyarakat. Realitas social mempunyai sebuah "kebenaran" sendiri. Kebenaran itu dikonstruksi oleh situasi social tertentu. Untuk itu sebuah situasi social tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai kebenarannya. Tulisan ini akan diawali dari elaborasi pemahaman Marx dan Habermas atas sebuah realita social. Kemudian bagaimana pemahaman mereka menghasilkan sebuah tafsir social tertentu. Pada bagian akhir saya akan berbicara sedikit tentang kebenaran dalam agama sebagai hasil penafsiran kitab suci.

Penekanan Marx atas Tindakan Praktis

Marx sama sekali tidak peduli dengan kebenaran sebagai bahasan teoritis belaka. Baginya kebenaran adalah sesuatu yang sungguh-sungguh praktis. Aktivitas yang menjadi dasar hubungan antara manusia dengan dunia, yang membentuk kebenaran adalah kerja. Bagi Marx, pertanyaan epistemologis yang penting adalah : realitas sosial, politik dan ekonomi yang seperti apa yang dipunyai dan dipikirkan oleh masyarakat?¹ Semuanya itu akan mempengaruhi situasi aktual dalam pekerjaan, dan tentu saja akan mempengaruhi kebenaran itu sendiri.

Untuk itu Marx melontarkan kritik terhadap idealisme absolut Hegel. Bagi Hegel, pikiran dan kenyataan merupakan perwujudan dari pikiran. Kebenaran bagi Hegel adalah dasar mutlak dari alam material, karena alam material tak lain dari kebenaran yang mengejawantah. Alam material sama dengan pikiran. Bagi Marx pandangan ini sama sekali tidak menyentuh kenyataan kongkret masyarakat. Bukan alam yang tergantung pada pikiran tetapi pikiranlah yang ditentukan oleh alam. Alam justru menjadi dasar yang mutlak bagi pikiran. Hegel menempatkan pengetahuan sebagai proses-proses material yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan Marx menempatkan pengetahuan sebagai proses-proses material yang terjadi dalam masyarakat. Proses-proses material itu adalah kerja.

Kegiatan manusia mempunyai arti pernyataan-diri, melalui obyektivasi. Manusia mempunyai kenyataannya yang penuh apabila ia dapat memahami diri. Dalam kesadarannya, manusia menyatakan diri tidak hanya melalui kesadaran kritis, melainkan dengan cara bekerja secara nyata, sehingga ia memandang dirinya sendiri dalam

dunia yang diciptakannya sendiri.² Bagi Marx, pengetahuan diperoleh dan diwujudkan dalam dan melalui kerja, maka pengetahuan bertautan dengan masalah praksis. Kalau masalahnya adalah masalah praksis, maka kemanjuran kebenaran pun akan ditentukan oleh realitas sosial yang membentuknya. Revolusi sosial merupakan pemecahan masalah atas realitas sosial sebelumnya dan ini merupakan suatu bentuk dari kebenaran. Kerja atau realitas sosiallah yang menentukan pengetahuan kebenaran, bukan sebaliknya.

Bagi Marx, tindakan praktis manusia sangat penting bagi datangnya suatu kebenaran. Untuk itu ia mengemukakan mengenai masalah alienasi (keterasingan) dalam dunia pekerjaan. Jika pekerjaan menjadi sarana perealisasi diri manusia, seharusnya bekerja memberikan kegembiraan dan kepuasan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bagi kebanyakan orang, terutama kaum buruh dalam industri sistem kapitalis, pekerjaan tidak merealisasikan hakikat mereka, justru mengasingkan mereka.³ Mengapa bisa terjadi demikian? Karena orang bekerja dengan terpaksa, hanya sekedar untuk bertahan hidup, bukan demi kebebasan dan universalitas. Akibatnya orang menjadi terasing, dan tidak dapat mewujudkan dirinya. Untuk itu sangat ditunggu tindakan praktis yang akan menghancurkan alienasi dan mewujudkan kebenaran.

Dengan demikian kebenaran dalam pemikiran Marx adalah terwujudnya realitas sosial yang menghancurkan alienasi tersebut. Kebenaran merupakan konstruksi sosial, yang mewujudkan dalam kesadaran akan adanya alienasi dan menghancurkannya. Kondisi alamiah masyarakatlah yang memunculkan dan mewujudkan kebenaran tersebut. Nampaknya bagi Marx, kebenaran harus menghindarkan diri dari konsep yang “muluk-muluk”. Kebenaran harus membawa manusia pada kebebasan dan perwujudan diri, yang dapat dirasakan langsung dalam suatu situasi sosial. Kebenaran yang sangat pragmatis.

Kebenaran Diskursus Habermas

Habermas melontarkan kritik terhadap pemahaman Marx. Baginya, teori Marx hanya sekedar merupakan teori obyektif yang sekedar mendeskripsikan hukum-hukum obyektif perkembangan masyarakat. Akibatnya teori ini kehilangan daya pembebasnya. Marx menerangkan hukum-hukum ekonomi sebagai suatu hukum alam. Demikian juga pandangan Marx tentang ilmu-ilmu budaya dipahami sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum sejarah dan masyarakat. Ilmu budaya dipahami sebagai “pengetahuan untuk mengontrol”. Menurut Habermas, terjadi perubahan dari pengetahuan refleksif menjadi pengetahuan produktif.⁴

Bagi Habermas, Marx mereduksikan manusia pada satu tindakan saja, yakni pada pekerjaan. Interaksi hanya diartikan sebagai kerja. Bentuk interaksi yang direduksi adalah komunikasi. Marx berusaha memahami komunikasi sebagai perkembangan dari pekerjaan. Habermas menyatakan hal itu tidak mungkin. Alasannya adalah:

1. Bekerja adalah sikap manusia terhadap alam, sedangkan komunikasi adalah sikap manusia terhadap manusia yang lain.
2. Pekerjaan adalah hubungan kekuasaan (yang aktif terhadap yang pasif, yang kuat terhadap yang lemah-manusia menguasai alam), komunikasi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak saling mengakui kebebasan dan saling percaya.
3. Pekerjaan mempunyai rasionalitas tujuan. Tujuannya di luar pekerjaan yakni hasil kerja. Dijalankan menurut aturan teknis dan pengetahuan empiris. Komunikasi merupakan interaksi yang disampaikan secara simbolis, menurut bahasa dan norma-norma, mengandaikan adanya kesepakatan dan pengakuan bersama.

Dalam komunikasi, para partisipan berusaha membuat lawan bicara memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebut klaim-klaim kesahihan. Klaim-klaim itu diterima tanpa paksaan sebagai konsensus. Kalau konsensus tentang dunia alamiah dan obyektif kita mencapai klaim kebenaran. Kalau konsensus tentang pelaksanaan norma-norma dalam dunia sosial, kita mencapai klaim ketepatan. Kalau konsensus tentang kesesuaian dunia batiniah dengan ekspresi seseorang, kita mencapai klaim kejujuran. Kalau bisa mengatasi semua klaim di atas, maka kita mencapai klaim komprehensibilitas. Komunikasi yang efektif harus mencapai tahap ini. Untuk itu Habermas kemudian mengemukakan mengenai Teori Diskursus, yang memungkinkan tercapainya konsensus rasional.

Dalam teori diskursus, Habermas membedakan antara diskursus dengan apa yang disebut sebagai praksis-hidup, di mana orang berperilaku dan mengalami obyek-obyek di sekitarnya. Habermas mengatakan bahwa di dalam praksis-hidup-lah, suatu pengalaman lewat tindakan diperoleh dan saling dibagikan di antara sesama anggota masyarakat melalui komunikasi. Melalui komunikasi, informasi tentang pengalaman akan suatu obyek ditegaskan. Pengalaman di klaim sebagai bersifat obyektif, dengan pengertian dapat dibagikan di antara subyek yang saling berkomunikasi tadi. Namun sekaligus terhadap hal inilah terdapat kemungkinan terjadi kesalahan. Yang tak disadari. Mengapa? Karena tema komunikasi itu hanya berkisar pada masalah pengalaman berhubungan dengan hal-hal yang obyektif, namun tidak pernah membicarakan mengenai kemungkinan kesalahan terhadap klaim obyektivitas itu.

Kemudian, menurut Habermas, orang-orang yang saling berkomunikasi tadi mulai sadar bahwa klaim-klaim kebenaran yang secara implisit mereka lakukan dalam berkomunikasi satu dengan yang lain ternyata bersifat problematis, terbukti dengan munculnya beberapa perbedaan pendapat dan kesalah-pahaman di antara pelaku komunikasi tadi. Maka untuk mengatasi gangguan komunikasi yang berakibat pada gangguan interaksi antar mereka, klaim-klaim seperti itu tidak dapat diterima begitu saja, melainkan perlu diuji. Dengan demikian suatu komunikasi harus diangkat ke tingkat yang lain, di mana secara teliti kesahihan klaim yang dihasilkan harus dihasilkan dalam suatu konteks tindakan. Dalam konteks tindakan-lah kesahihan kebenaran itu dapat diuji. Tingkat komunikasi itulah yang disebut dengan istilah diskursus. Dalam diskursus, kita tidak bertukar informasi, tetapi saling berargumentasi untuk menghilangkan klaim-klaim kesahihan yang problematis tadi.

Habermas mengemukakan bahwa dalam tindakan-berbicara, orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah mengandaikan empat hal, yaitu: ungkapannya dapat dipahami, isi proposisinya benar, merupakan hal yang betul dan cocok bagi si pembicara untuk membuat ungkapan tersebut dan si pembicara penuh kebenaran dan kejujuran.

Selanjutnya pembedaan antara komunikasi yang dilakukan dalam konteks-tindakan dengan dalam diskursus, menurut Habermas mengimplikasikan dua hal.

Pertama, Habermas menempatkan kebenaran suatu pernyataan dalam wilayah diskursus. Kebenaran adalah suatu klaim kesahihan yang dapat dikemukakan lewat pernyataan yang kita tegaskan. Kebenaran hanya akan dipertanyakan dalam diskursus. Suatu diskursus mensyaratkan penundaan terhadap keperluan suatu tindakan atau tekanan dari pengalaman-pengalaman, sehingga dorongan yang diperbolehkan hanyalah kekuatan argumentasi; dan motivasi yang mendasarinya hanyalah kerja sama untuk menyelidiki kebenaran. Untuk dapat melakukan suatu diskursus – pada tingkat tertentu – kita harus keluar dari konteks tindakan dan pengalaman. Dengan melakukan hal itu, hasil akhir dari suatu diskursus dapat diharapkan berupa suatu pengakuan atau penolakan klaim-klaim kebenaran problematis, seperti telah disinggung di atas. Di sinilah letak perbedaan antara pemahaman kebenaran menurut konteks tindakan dengan menurut diskursus. Lebih jelasnya, kalau dalam konteks tindakan suatu klaim kebenaran itu diterima begitu saja tanpa pengkajian yang cermat dan kritis, sedang dalam suatu diskursus hal itu hanya dipandang sebagai “kenyataan sementara” yang bersifat hipotetis, yang sedang mengalami pengujian untuk mendapatkan legitimasinya.

Kedua, Habermas mengkritik kesalahan Teori Kebenaran Korespondensi yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan terhadap fakta yang berkorespondensi dengan pernyataan tersebut. Habermas setuju dengan Peter Strawson bahwa fakta adalah sesuatu yang membuat suatu pernyataan benar; karena itulah kita mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan bersifat melaporkan, mendeskripsikan, mengekspresikan fakta-fakta.⁵ Benda-benda, kejadian, orang dan penegasan-penegasannya, bagaimanapun, adalah obyek-obyek pengalaman yang tentangnya kita mengemukakan penegasan-penegasan dan yang daripadanya kita menegaskan sesuatu. Sesuatu yang kita tegaskan dari obyek-obyek, baru dapat dinamakan sebuah fakta, bila penegasan itu mempunyai dasar rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Habermas menunjukkan bahwa seseorang mempunyai pengalaman yang berasal dari obyek-obyek, dan fakta-fakta adalah apa yang seseorang tegaskan. Aku dapat mengalami obyek dan menegaskan fakta, tetapi tidak dapat sebaliknya yaitu mengalami fakta dan menegaskan obyek. Jadi, bila obyek-obyek pengalaman kita itu merupakan sesuatu yang ada di dunia ini, kita tidak boleh mengatakan – dengan cara yang sama seperti pada fakta-fakta – bahwa mereka merupakan sesuatu yang ada di dunia ini. Padahal dalam teori korespondensi dikatakan bahwa fakta-fakta adalah sesuatu yang ada di dunia, dalam pengertian yang sama persis sebagaimana halnya obyek-obyek.

Atas dasar itulah Habermas kemudian mengemukakan Teori Kebenaran Konsensus. Dengan teori ini kebenaran pernyataan dimengerti sebagai persetujuan

potensial dari semua pihak yang berinteraksi atau dengan kata lain, kebenaran berarti suatu janji tercapainya konsensus yang rasional. Kebenaran suatu proposisi yang dinyatakan dalam suatu diskursus berarti bahwa setiap orang dalam kelompok itu dapat diyakinkan lewat nalar untuk mengakui bahwa klaim kebenaran pernyataan itu telah diterima dengan benar. Sebuah pernyataan dapat menghasilkan suatu konsensus karena ada alasan rasional yang meyakinkan. Secara jelas Habermas mengatakan bahwa kebenaran bukanlah fakta bahwa sebuah konsensus disadari, tetapi lebih cocok untuk dikatakan bahwa kapanpun dan di manapun, bila kita melakukan suatu diskursus, sebuah konsensus dapat disadari di dalam keadaan-keadaan yang mengenalnya sebagai konsensus yang berdasar. Dengan demikian, kebenaran berarti kemampuan penegasan yang terjamin.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah : Keadaan seperti apa yang menyebabkan sebuah penegasan konsensus bisa berdasar dan terjamin? Untuk itu Habermas mengatakan bahwa perlu ada suatu "situasi pembicaraan yang ideal". Yaitu perlu adanya suatu daya argumentasi yang baik. Dan argumentasi yang baik tidak terdiri dari kalimat, melainkan tindakan-berbicara. Adanya kekuatan pragmatis berupa daya meyakinkan, yang mampu bertahan terhadap pertanyaan yang radikal sekalipun. Sebuah konsensus yang dicapai, dimungkinkan untuk menjadi bahan dalam diskursus berikutnya. Untuk itu dibutuhkan kebebasan untuk bergerak, Kebebasanlah yang menjamin adanya pergerakan yang bebas dari diskursus yang satu ke diskursus yang lain.

Situasi pembicaraan ideal harus meliputi empat hal yaitu : pertama, merupakan bentuk diskursus yang di dalamnya tidak ada paksaan atau tekanan lain kecuali tekanan argumentasi itu sendiri; kedua, di dalamnya terdapat simetri yang sejati di antara para peserta yang terlibat dalam diskursus itu; ketiga, di dalamnya peran-peran dialog dapat saling dipertukarkan secara universal; keempat, tidak ada bentuk dominasi apapun.

Namun untuk mencapai situasi seperti itu, masih ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya distribusi kesempatan yang adil bagi seluruh peserta diskursus, untuk memilih dan menerapkan setiap tindakan-berbicara.
2. Setiap peserta harus bebas untuk mengemukakan penegasan apapun, atau menanyakan apapun, dengan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan sikap, perasaan, perhatian mereka, agar semua dapat jujur dan tidak ada lagi yang tersembunyi atau disembunyikan.
3. Setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan perintah, menentang, mengizinkan, melarang dsb.
4. Tidak ada peserta yang diistimewakan, sehingga kesamaan kesempatan untuk memulai dan melanjutkan setiap diskusi dapat diterapkan.

Dengan demikian nampak bahwa bagi Habermas, konsep kebenaran tidak dapat dianalisa terpisah dari kebebasan dan keadilan. Untuk mendekati situasi pembicaraan ideal seperti itu, dituntut suatu "bentuk kehidupan baru", yaitu di mana setiap institusi dan praktek sosial maupun politis mengizinkan dilakukannya diskursus yang bebas,

tak terhalangi, berimbang dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Habermas mengemukakan soal kesepakatan sebagai suatu rasionalitas komunikatif. Konsep kesepakatan ini ada dua tahap, yaitu:

1. Konsep kesepakatan distributif, di mana kebenaran yang diperoleh diterima begitu saja sebagai suatu dalil tertentu, tanpa penuh kesadaran.
2. Konsep kesepakatan kolektif, di mana kebenaran dari pemikiran-pemikiran itu sendiri berasal dari kesepakatan dan suatu diskusi – penuh kesadaran.

Konteks Sosial: Sebuah Kebenaran Tertentu

Dari uraian di atas terlihat, bahwa bagi Marx maupun Habermas kebenaran tidak akan tercapai tanpa adanya suatu konteks sosial tertentu. Bagi Marx konteks sosial itu adalah kerja yang menyingkirkan alienasi, sedangkan bagi Habermas konteks sosial itu adalah diskursus. Bagi Marx, kebenaran ditentukan oleh struktur alam material, yang namanya kerja. Sedangkan bagi Habermas, kebenaran merupakan hasil konsensus dalam diskursus. Dalam diskursus, setiap orang yang ada di dalamnya berinteraksi. Di sana relasi sosial terjadi dan konteks sosial dibangun. Hanya saja Habermas tidak terlalu pragmatis sebagaimana halnya Marx. Habermas masih menyisakan komponen-komponen “teori” dalam penegasan kebenaran. Pernyataan-pernyataan masih diperhitungkan dalam diskursus, walaupun demikian Habermas tidak terjebak dalam teori kebenaran linguistik.

Kebenaran sebagai sebuah konstruksi sosial tentu mempunyai kekuatannya sendiri dalam wacana perdebatan mengenai kebenaran. Hubungan sosial mendapat tempat dalam wacana mengenai kebenaran ini. Peter Winch,⁶ mengatakan bahwa hubungan sosial seseorang dengan orang lain dibatasi dan dipengaruhi oleh pemikirannya mengenai realitas. Oleh karena realitas dapat ditangkap sejauh ia menguasai bahasa tertentu, maka hubungan sosial pun akan terpengaruh. Di sini berarti “bahasa kebenaran”, hanya dapat ditangkap dalam suatu realitas sosial tertentu, di mana orang-orang di dalamnya mempunyai pengertian yang sama terhadap suatu masalah. Bagi Winch, hubungan sosial adalah ekspresi pemikiran tentang realitas. Dan dalam realitas tersebut tercermin kebenaran. Dalam hubungan sosial itu harus terdapat aturan-aturan. Aturan-aturan itulah yang membentuk konteks sosial. Dengan demikian dalam pembicaraan mengenai suatu realitas (dan tentu kebenaran yang ada di dalamnya), orang harus masuk dalam aturan tersebut. Hal ini hampir mirip dengan “syarat-syarat” yang dikemukakan oleh Habermas sebagai dasar bagi adanya diskursus (yang dalam pemahaman Winch disebut konteks sosial).

Namun, bila kita memahami kebenaran dalam konteks seperti itu, apakah kemudian pemahaman Thomas Kuhn menjadi berlaku, bahwa kebenaran (dalam konteks Kuhn kebenaran sains) menjadi relatif terhadap paradigma yang dianut? Tidak ada tolok ukur yang netral dan berlaku untuk semua paradigma. Yang satu tidak dapat dibandingkan secara seukur (*incommensurable*) dengan paradigma yang lain. Memang Habermas atau Winch masih memberikan sedikit peluang dengan mengatakan

bahwa kebenaran itu pun dapat dibawa dalam suatu diskursus baru (atau konteks sosial baru) sejauh orang-orang yang ada di dalamnya menyepakati syarat-syarat yang menjamin keberlangsungan diskursus itu. Habermas dengan sangat sadar memahami bahwa konsep-konsep yang diperoleh lewat analisa sintesis, tidak sama dengan situasi kongkrit dalam realitas sosial. Untuk itu diskursus demi diskursus perlu terus dilakukan. Sedangkan dalam Marx, penghancuran alienasi nampaknya justru menjadi indikator satu-satunya bahwa kebenaran itu nampak mewujud dalam realitas sosial.

Masalah berikutnya adalah, jika kebenaran ditentukan oleh konstruksi sosial dengan relasi sosial yang ada di dalamnya, lalu bagaimana status individu? Artinya dengan pemahaman seperti itu, maka relasi sosial yang terdapat dalam konstruksi sosial tersebut mengatasi individu. Habermas masih memberikan tempat terhadap individu dalam suatu diskursus dengan penekanannya pada kebebasan. Syarat-syarat dalam diskursus Habermas menunjukkan penghargaan dan pemberian tempat terhadap individu. Individu dalam Habermas menjadi individu yang harus “kritis” ketika memasuki diskursus, sebab kalau tidak kritis bagaimana ia dapat memasuki diskursus dengan keketatan argumentasi, seperti yang disyaratkan Habermas? Individu yang memasuki diskursus adalah individu yang mempunyai *criticism intersubjectivity*, yang mempunyai standar rasionalitas yang cukup untuk menerima suatu konsensus. Weber dalam hal ini jauh lebih kuat dalam penekanannya mengenai individu. Bagi Weber individu adalah yang real dan kongkret, sementara manusia tidak mewakili realitas, hanya kumpulan individu. Untuk itu baginya konsep – termasuk konsep kebenaran - tidak mewakili realitas.

Dengan memberikan penghargaan terhadap fakta sosial (baik relasi sosial maupun individu yang ada di dalamnya), sebenarnya mau dikatakan bahwa problem kebenaran harus berangkat dari sana. Untuk itu menjadi sangat penting untuk memperhatikan realitas sosial masing-masing. Kebenaran bukanlah sekedar masalah konsep-konsep belaka. Kebenaran melibatkan individu-individu yang mengemukakannya. Dan individu senantiasa berada dalam suatu konteks, baik ketika ia mengalami sesuatu atau pun ketika ia menegaskan pernyataan tertentu. Ia senantiasa berada dalam relasi dengan sesuatu di luar dirinya. Keberadaan individu-individu itulah yang juga harus mendapat perhatian dalam menemukan sebuah kebenaran. Namun bagaimana pun harus diakui bahwa melalui konstruksi sosial pun, kebenaran tetaplah sesuatu yang akan terus menerus diperdebatkan. Teori kebenaran sebagai konstruksi sosial, tidak dapat menghapus kerinduan manusia untuk bertanya apakah ada kebenaran yang universal dan mutlak? Dan kalau ada, kebenaran seperti apa? Lewat Marx yang pragmatis kita belajar bagaimana realitas sosial benar-benar membentuk kebenaran. Sedangkan lewat Habermas, kita belajar bagaimana pertautan teori dengan praksis membentuk kebenaran. Dan bagaimana itu diusahakan dalam pola-pola komunikasi yang ada. Usaha pencarian manusia terhadap hal itu, masih akan tetap terus diperhatikan. Sementara hal itu berjalan, teori kebenaran sebagai konstruksi sosial cukup memberikan dasar. Paling tidak sebagai bekal dalam memasuki setiap diskursus yang harus dijalani dalam pencarian kebenaran. Memang menjadi bersifat relatif, tetapi tidak pula jatuh dalam relativisme.

Bagaimana Dengan Tafsir Alkitab?

Alkitab ditulis dengan sebuah realitas social tertentu. Dengan proposisi ini ada dua hal yang hendak disampaikan, pertama realitas social itu mempunyai sebuah kebenaran yang harus diungkap. Dalam realitas itu, setiap orang yang terlibat di dalamnya – termasuk penulis Alkitab – mempunyai satu “bahasa” yang sama mengenai sesuatu. Jika tidak tentunya yang akan disampaikan tidak akan berhasil. Dalam bahasa Peter Winch, realitas social itu sudah merupakan kebenaran awal yang harus diakui terlebih dahulu. Tanpa mengakui kebenaran realitas social ini, apa yang akan dibicarakan berikutnya menjadi tidak berlaku. Kedua, “Kebenaran” dalam hal ini kebenaran hakiki yang diimani dalam kekristenan merupakan kebenaran yang mempunyai wajah historis dan bernafaskan perkembangan social dari jaman ke jaman. Kebenaran (dengan “K”-besar), ditafsirkan dalam kerangka sebuah realitas social tertentu. Dengan demikian kebenaran itu bukan sesuatu yang sifatnya final. Namun jika demikian pemahamannya, pertanyaan pertama yang harus dikemukakan adalah apakah kebenaran absolut dalam kaca mata kekristenan itu ada? Dan bagaimana isi pemahaman itu? Jika kebenaran absolut itulah kebenaran dalam bentuk realitas social yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan bersifat tidak dapat diperbandingkan, itu tidak menjadi masalah. Namun jika pemahaman akan kebenaran absolut itu adalah kebenaran mutlak yang tidak berubah dari waktu ke waktu, maka apa makna sebuah tafsiran social? Tafsiran social bisa jadi akan merupakan membenaran atau penolakan atas sebuah pengalaman hidup, bukan *penerimaan* atas sebuah pengalaman hidup. Untuk menerima sebuah pengalaman hidup dalam kaca mata tertentu bukan hal yang mudah. Di sinilah pemahaman kebenaran bersifat tidak dapat diperbandingkan menjadi penting. Mengapa? Ketika orang bicara tentang kebenaran maka pada saat yang sama, biasanya ia bicara mengenai siapa yang salah. Absolutisme menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Memang kita tidak dapat menutup mata akan kerinduan manusia untuk mendapatkan kebenaran abadi, kebenaran universal yang bersifat mutlak. Menerima realitas social sebagai sebuah kebenaran bukan berarti menolak adanya kebenaran universal. Tinggal bagaimana kita memahami kebenaran universal itu seperti apa.

Keyakinan kebenaran agama-agama biasanya mendasarkan diri pada tafsir atas kitab suci. Kitab suci yang berisi tindakan-tindakan religius atau pengalaman-pengalaman iman orang-orang yang ada di dalamnya. Max Weber memberikan pemahaman secara sosiologis bahwa setiap aktor suatu tindakan religius pastilah hendak menunjukkan makna subjektif dari tindakan yang ia tampilkan dan sekaligus menunjukkan pendapatnya terhadap tindakan orang lain. Untuk itu empat hal perlu diperhatikan dalam menafsirkan tindakan religius itu, pertama adalah aktor (bisa seseorang atau sebuah komunitas, tujuan, alat mencapai tujuan itu dan kondisi-kondisi yang ada.⁷ Tujuan adalah tahap akhir yang menjadi orientasi dari aktor tersebut dalam tindakan religiusnya. Alat adalah benda, komunitas lain, orang lain atau proses yang dapat digunakan atau dimanipulasikan sang aktor untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kondisi adalah orang, komunitas, proses yang dipahami oleh sang aktor tidak

dapat digunakan atau dimanipulasi tetapi tetap harus diperhitungkan. Analisa terhadap keempat hal itu akan memberikan sebuah kebenaran terhadap realitas sosial yang sedang digali dalam peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam kitab suci.

Penutup

Penggalian akan kebenaran, terus menerus akan menjadi usaha pencarian manusia akan makna dirinya. Sebagai upaya pencarian tentunya apa yang dipercayai saat ini sebagai kebenaran dapat terus menerus dibawa dalam dialog yang relevan untuk kesejahteraan bersama. Sebuah realitas sosial, ternyata bukanlah realitas yang bersifat tertutup. Ia bersifat terbuka dan amat kaya. Untuk itu memandang realitas dalam berbagai dimensi menjadi amat diperlukan. Tanpa itu, tentunya kita akan kehilangan kekayaan yang justru membentuk makna diri kita.

Buku-buku Acuan

- Campbell, Richard, *Truth and Historicity*, Oxford:Oxford Univ. Press, 1992. Bab 15.
- Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi*, Yogyakarta:Kanisius, 1990.
- Magnis-Suseno, Franz, *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta:Gramedia, 2000
- Von Magnis, Frans, "Manusia dan Pekerjaannya, Berfalsafah Bersama Hegel dan Marx", dlm. *Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*. (Ed) S.Poespowardjono & K. Bertens, 1978.
- Winch, Peter, *The Idea of The Social Science*, London:Routledge & Kegan Paul Press, 1958. (Khususnya Bab I).
- Sharot, Stephen, *A Comparative Sociology of World Religions*, New York Univ.Press: New York, 2001, h.20.

¹ Richard Campbell, *Truth and Historicity*, Oxford:Oxford Univ.Press, 1992, p.323.

² Lih. Franz von Magnis, *Manusia dan Pekerjaannya, Berfalsafah Bersama Hegel dan Marx*. Dlm. Soerjanto Peospowardojo & K. Bertens (Ed.), *Sekitar Manusia Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*, 1978. H. 79-83.

³ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx; Dari Perselisihan Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta:Gramedia, 2000, h.95.

⁴ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, Yogyakarta:Kanisius, 1990. H.125.

⁵ Richard Campbell, *Truth and Historicity*, p. 343.

⁶ Peter Winch, *The Idea of a Social Science*, London:Routledge&Kegan Paul Press, 1958. Bab I, h.1-33.

⁷ Stephen Sharot, *A Comparative Sociology of World Religions*, New York Univ.Press: New York, 2001, h.20.